

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Padang dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara BPBD Kota Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, serta berbagai aktor lainnya telah terlaksana dan menunjukkan proses kerja sama yang cukup baik. Kolaborasi tersebut ditandai dengan adanya koordinasi lintas sektor, pembagian tugas sesuai kewenangan, serta komitmen bersama dalam upaya mengurangi risiko banjir. Namun demikian, pelaksanaan *Collaborative Governance* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi, terutama dalam aspek keterlibatan masyarakat, integrasi data dan informasi, serta orientasi kebijakan yang masih lebih berfokus pada penanganan dampak dibandingkan pencegahan penyebab banjir secara menyeluruh.

Pada variabel kondisi awal, kondisi awal kolaborasi telah mendukung terbentuknya kerja sama antaraktor melalui adanya kesadaran bahwa permasalahan banjir merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Pengalaman kerja sama sebelumnya dan minimnya konflik antarlembaga turut menjadi modal dalam membangun kolaborasi. Akan tetapi, temuan di lapangan mengungkapkan masih adanya ketimpangan sumber daya, perbedaan kapasitas,

serta pembagian kewenangan yang bersifat sektoral sehingga koordinasi dan integrasi sumber daya belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selanjutnya pada variabel kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang dijalankan telah mampu memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian permasalahan melalui peran BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana serta dukungan Pemerintah Kota Padang dalam menyatukan berbagai instansi. Kepemimpinan yang bersifat kolaboratif tersebut mampu menjaga hubungan kerja antaraktor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari aktor kolaborasi masih belum optimal karena keterlibatannya masih lebih dominan pada kegiatan operasional dan mitigasi sosial dibandingkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Lalu pada variabel desain institusi, kolaborasi telah memiliki landasan kelembagaan yang cukup kuat melalui regulasi, standar operasional prosedur, serta pembagian tugas yang jelas pada masing-masing instansi sehingga mampu meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan. Keterwakilan aktor juga telah mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, aparatur kewilayahan, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS). Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih bersifat kondisional dan belum sepenuhnya menjangkau proses perencanaan kebijakan maupun pembangunan infrastruktur. Selain itu, transparansi informasi masih menghadapi kendala berupa

belum terintegrasinya data antarinstansi serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi teknis yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.

Pada variabel proses kolaborasi, proses kolaborasi telah berkembang secara positif melalui dialog tatap muka yang dilakukan secara berkala maupun situasional, terbangunnya kepercayaan antarinstansi berdasarkan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing, adanya komitmen bersama dalam mengurangi risiko banjir, serta kesamaan pemahaman mengenai pembagian peran antaraktor. Proses kolaborasi tersebut juga telah menghasilkan berbagai capaian nyata, seperti pemasangan *Early Warning System* (EWS), penyusunan peta kerawanan banjir, normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, pengembangan infrastruktur pengendali banjir, pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS), serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dialog dan pemahaman bersama dengan masyarakat masih belum optimal karena masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan sejak tahap awal perencanaan. Selain itu, proses kolaborasi masih lebih banyak diarahkan pada penanganan dampak banjir daripada penyelesaian faktor-faktor penyebab banjir secara ekologis dan berkelanjutan.

Kolaborasi yang terbangun telah mampu menciptakan koordinasi, pembagian peran, dan kerja sama antaraktor dalam penanggulangan banjir. Akan tetapi, efektivitas kolaborasi masih perlu ditingkatkan melalui penguatan partisipasi masyarakat. dalam proses pengambilan keputusan, integrasi data dan informasi antarinstansi, peningkatan transparansi, serta penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan dampak banjir, tetapi juga pada pencegahan penyebab banjir secara komprehensif dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, beberapa saran dari peneliti terhadap *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Padang bersama BPBD Kota Padang perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih kolaboratif melalui integrasi data kebencanaan antarinstansi, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan program, serta penyelenggaraan forum koordinasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang pengambilan keputusan bersama.
2. Pemerintah Kota Padang perlu memperkuat kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika banjir terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan air, penguatan pengelolaan drainase, pengendalian tata ruang, serta pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kolaborasi yang dibangun tidak hanya mampu mengurangi dampak banjir, tetapi juga dapat meminimalkan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir.
3. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan tidak hanya dalam kegiatan gotong royong dan penanggulangan saat terjadi bencana, tetapi juga dalam proses perencanaan program penanggulangan banjir. Pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih luas melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun kegiatan edukasi kebencanaan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai

pembagian kewenangan antarinstansi, pentingnya menjaga lingkungan, serta rasa memiliki terhadap berbagai fasilitas mitigasi bencana yang telah disediakan.

